



Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia di Desa Pedangkamulyan

Wasdi

Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya

Email: izuddinwasdi@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 26-01-2022

Direvisi : 06-02-2022

Disetujui : 25-02-2022

Kata Kunci: sumber daya manusia; peran pemerintah desa; pembangunan sumber daya manusia

Abstrak

Pemrintahan Desa memiliki peran vital dalam pembangunan tetapi masih banyak masalah yang terjadi diantaranya, dalam pemerintahannya terdapat permasalahan peran pemerintah desa, khususnya dalam memberdayakan masyarakatnya kurang adanya integrasi dan hubungan sinergis antara perangkat desa dengan masyarakat, maupun kepala desa dengan aparatur desanya, pro dan kontra program kepala desa, hal tersebut berpengaruh pada jalannya peranan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, informan, wawancara, studi kepustakaan dan observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan informasi yang memvalidasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai motivator, fasilitator, dinamisator, stabilisator, inovator dan pelopor telah berjalan namun masih memerlukan perbaikan yang konsisten. Hal tersebut membutuhkan hubungan sinergis antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Untuk pengembangan sumber daya manusia dari aspek fisik masih rendah karena sarana kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat masih ada yang belum bisa terpenuhi, dari aspek intelektual masih dikatakan kurang, karena minimnya jumlah sekolah di Desa Pedangkamulyan dan psikologis atas dasar spiritual keagamaan masyarakat sudah cukup tinggi, dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat telah menunjukkan ke arah yang baik.

Keywords: *human resources; the role of the village government; human resource development*

Abstract

The Village Government has a vital role in development but there are still many problems that occur including, in its administration there are problems with the role of the village government, especially in empowering the community, there is a lack of integration and synergistic relationships between village officials and the community, as well as village heads and village officials, the pros and cons of the program. village head, this affects the running of the role of the village. The purpose of this study was to determine the role of the village government in carrying out the development of Human Resources (HR) in the Village of Swordsmen, District of Bojonggambir, District of Tasikmalaya. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques, informants, interviews,

literature studies and field observations. The collected data is processed through data reduction, presentation of verification data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the village government as a motivator, facilitator, dynamist, stabilizer, innovator and pioneer has been running but still requires consistent improvement. This requires a synergistic relationship between the village government and the community. For the development of human resources from the physical aspect, it is still low because there are still health facilities and the feasibility of living for the community that cannot be fulfilled, from the intellectual aspect it is still said to be lacking, because of the lack of schools in the village of Swordsmen and the psychological on the spiritual basis of the community's religion is quite high, it is proven with religious activities the community has shown a good direction.

Correspondence author: Fadjrin Wira Perdana

Email: fadjrinwira@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Secara filosofis Desa merupakan suatu ksatuan hukum yang di akui oleh negara dan berhak mengatur urusannya untuk kepentingan masyarakat setempat sebagai suatu sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah desa yang menegaskan kembali komitmennya terhadap pemerintahan yang baik dan pembangunan desa yang kuat, unggul, bebas dan demokratis, serta meletakkan dasar yang kokoh bagi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga desa harus menjadi ujung tombak pengelolaan masyarakat, karena pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. ([Santosan & Adji](#), 2018). Desa merupakan modal pembangunan di berbagai bidang termasuk sosial politik, budaya dan ekonomi, termasuk pondasi dasar dalam pembangunan Sumber daya manusia sebelum melangkah ke urusan pemerintah pusat yang di kelola oleh pemerintah lokal setempat agar lebih meningkat keberadaannya.

Berdasarkan hasil observasi awal didapat informasi bahwa dalam pemerintahannya terdapat permasalahan peran pemerintah desa, khususnya dalam memberdayakan masyarakatnya kurang adanya integrasi dan hubungan sinergis antara perangkat desa dengan masyarakat, maupun kepala desa dengan aparatur desanya, pro dan kontra program kepala desa, hal tersebut berpengaruh pada jalannya peranan pemerintah desa. Pembangunan adalah saslasatu proses menuju arah yang lebih baik. Peran sumberdaya manusia adalah sebagai modal awal dalam sebuah organisasi sehingga memegang peranan penting dalam proses maupun pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan dalam sebuah kinerja organisasi terutama terhadap penduduk Desa Pedangkamulyan, berikut adalah data kepadatan penduduk di Desa pedang kamulyan.

Tabel 1.1

Jumlah Kepadatan Penduduk						
No	Desa	L	P	Jumlah	Luas Wilayah	Kepadatan
1	Ciroyom	872	853	1.725	8,26 km ²	209 per km
2	bojongkapol	1.820	1.838	3.648	11,75 km ²	310 per km
3	Bojongsambir	1.400	1.439	2.868	7,97 km ²	360 per km
4	Pedangkamulyan	1.997	2.121	4.118	9,88 km ²	426 per km
Total		6.087	6.251	12.359	37,87 km ²	328 per km

Sumber: Kantor Desa Pedangkamulyan, 2018

Berdasarkan data di atas jumlah terpadat penduduk adalah di Desa Pedangkamulyan sebanyak 4.118 orang yang terdiri 1.997 laki-laki dan 2.121 perempuan. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojongsambir diantaranya ialah harus mengembangkan salasatu bentuk kemandirian pada masyarakat melalui peningkatan pengetahuan melalui pendidikan keterampilan secara vokasi dengan pemanfaatan sumber daya masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang memiliki keberpihakan pada masyarakat, terutama pada ibu rumah tangga, anak-anak agar lebih produktif sebagai prioritas pembangunan yang di butuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta yang ada, permasalahan pokok di Desa Karangluyung adalah:

1. Masih rendahnya dalam dimensi sumber daya manusia. Informasi tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan dimana masyarakat yang putus sekolah terbanyak adalah di tingkat SD kebanyakan dari kaum wanita yang memutuskan untuk langsung bekerja bahkan menikah, hal tersebut menggambarkan kurangnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Desa Pedangkamulyan

Usia Belajar	Wajib	Tingkat Pendidikan					Putus Sekolah
		SD	SMP	SMA	S1	S2	
7-12		3581	-	-	-	-	447 orang
12-14			463	-	-	-	296 orang
14-16		-	-	278	-	-	87 orang
16-22		-	-	-	19	-	-
22-27		-	-	-	-	3	-

Sumber: Kantor Desa Pedangkamulyan, 2018

2. Banyaknya pengangguran yang produktif bekerja hanya 2264 orang sedangkan yang menganggur atau pekerjaannya tidak tetap sebanyak 1854 orang dari jumlah penduduk 4.118 yang menganggur sebesar 45,02%.
3. Masyarakat belum bisa memanfaatkan sumber daya alam setempat, dimana banyak lahan yang menganggur dan harus diolah menjadi lahan produktif. Dari 1.145,450 Ha, hanya

189,600 Ha yang merupakan hutan milik pemerintah yang tidak produktif untuk digarap menjadi lahan produktif.

4. Aparatur Desa Pedangkamulyan sebanyak 19 orang yang pendidikannya sampai SLTA, khususnya Kepala Desanya dan yang S1 sebanyak 3 orang, hal ini menunjukkan kurangnya kualitas Sumber daya manusia di apratur Desa Pedangkamulyan.
5. Permasalahan pemberdayaan perempuan di Desa Pedangkamulyan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran, tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang dalam menjalankan program KWT, petani kelompok dan pengolahan lahan pertanian, dilihat dari pendidikan tertinggi yang selesai di Desa Pedangkamulyan 28 % tidak tamat SD, 22% tidak tamat.
6. IPM Pedangkamulyan paling rendah karena merupakan daerah yang tertinggal, dikarenakan faktor geografisnya dan SDM sebesar 30%.

A. Hakikat Peran

Menurut Okta Hendrik ([Okta Hendrik](#), 2017), bahwa: "Peran adalah karakteristik seseorang yang diharapkan untuk membuat perubahan dan diharapkan untuk membuat kemajuan serta mampu meningkatkan kinerja seseorang."

a. Motivator

Motivator merupakan sebuah dorongan yang diberikan oleh seseorang maupun lembaga dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Motivator dalam pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa sebagai motivator diperlukan sebagai dorongan agar pegawai desa maupun masyarakat lebih kompeten dalam mengelola sumber daya alam sekitar ([Gultom](#), 2020). Motivator sangat dibutuhkan sebagai media pendorong dalam bertindak, seperti halnya desa melakukan sosialisai, sayembara, memberikan hadiah kepada masyarakat yang produktif dalam mengelola hidupnya. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan kepada masyarakatnya, sehingga tercipta masyarakat yang madani dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

b. Fasilitator

Fasilitator yaitu sebagai pembagunan sumber daya manusia, Peran pemerintah desa adalah menyediakan segala fasilitas dan mendukung semua proyek yang ada di Desa Sifman, Kecamatan Bojongsibir, Provinsi Tasimalaya. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, pekerja dan masyarakat ([Wulandary & Rohman](#), 2018).

c. Dinamisator

Dinamisator yaitu sebagai pembangunan SDM yang dinamis dan baik, pengelolaan desa dan masyarakat harus mampu bersinergi dalam pilar-pilar *good governance*. Pemerintah desa sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah desa memiliki peran mengkoordinasikan kedua pihak, sehingga menghasilkan kesepakatan simbiosis untuk menciptakan tenaga kerja yang baik. ([Simamora & Sinaga](#), 2016).

d. Stabilisator

Kepala desa dapat berperan sebagai pengawas dan melakukan interaksi sehari-hari dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari. Peran stabilisator sebagai kepala desa dapat berupa tindakan,

antara lain: ([Andika](#), 2021):

- 1) Melakukan kegiatan ketertiban terhadap RT dan RW dan menghindari perseusihan antar amsyarakat (mendamaikan perselisihan).
- 2) Menciptakan kesetabilan keamanan desa (program siskamling).
- 3) Melakukan tindakan dalam hal ekonomi dan kesetabilan (simpan pinjam).
- 4) Melakukan kegiatan dan menciptakan gotong royong dalam hal kebersihan (program gotong royong).
- 5) Menciptakan dan melakukan kegiatan sosial peningkatan sumbedaya manusia melalui pendidikan karakter (program pendidikan dan latihan).

e. Inovator

Menurut ([Siagian](#), 2014) bahwa “Inovator dari segi manajemen pembangunan diartikan sebagai orang-orang yang dapat menemukan hal-hal baru, ide-ide baru dan sistem baru dalam proses pembangunan. Sebagai seorang inovator, kepala desa secara keseluruhan dapat menjadi sumber ide-ide baru, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang lebih efisien dan akselerasi”.

f. Pelopor

Kepala desa sebagai pelopor adalah orang yang memiliki ide dan mengajak warganya untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada visi dan misinya. Menurut ([Siagian](#), 2014) bahwa “Pelopor berarti pemerintahan memulai dengan inovasi dalam pemerintahan yang jelas-jelas meyakini bahwa ia harus menjadi pelopor dalam segala bidang kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, sebagai pelopor, ia harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Sebagai pionir, kepala desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, artinya kepala desa mendukung kelancaran pembangunan.”.

g. Modernisator

Kepala desa harus bisa mengubah pola Pemikiran lama menjadi pemikiran modern untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kepala desa selaku modernisator harus mampu merencanakan rencana pembangunan di setiap kecamatan desa berdasarkan kondisi masyarakat, budaya dan perekonomiannya. Rencana pembangunan harus berpedoman pada tujuan pembangunan nasional yang rasional, luas dan tepat waktu. Peranan selaku modernisator dapat berupa tindakan yang dilakukan antara lain ([Siagian](#), 2014):

- 1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kemampuan dan kemahiran manajerial.
- 3) Kemampuan mengolah kekayaan alam sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
- 4) Memiliki visi yang jelas tentang masa depan.

B. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan adalah proses linier, dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat maju. Pembangunan awalnya mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi ([Sondakh](#) et al., 2021). Pertumbuhan suatu masyarakat dianggap berhasil hanya jika pertumbuhan ekonominya mencukupi. Oleh karena itu, produktivitas masyarakat atau

produktivitas pemerintah diukur setiap tahun ([Lestanata & Pribadi](#), 2016).

a. Hakikat Pembangunan Sumber Daya Manusia

Konsep pembangunan yang berpusat pada populasi melihat inovasi yang berasal dari masyarakat sebagai masukan bagi pembangunan, dengan mengutamakan kesejahteraan material dan spiritual dalam proses pembangunan. ([Totok & Poerwoko](#), 2013). Korten mengemukakan bahwa ada 3 unsur penting yang dapat menentukan konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat yaitu sebagai berikut:

b. Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia

Setelah mengemukakan beberapa teori mengenai pembangunan sumber daya manusia. ([Suparman](#), 2016) adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan Fisik (kesehatan)

Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan energi, keterampilan, kekuatan, dan kualitas serupa. Indikator dalam mengukur kemampuan fisik (kesehatan) ini meliputi:

- a. Memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani
- b. Memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi

2) Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk melakukan berbagai tugas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi:

- a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
- b. Keanekaragaman dan kualitas tingkat pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika ketenagakerjaan di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- c. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.

3) Kemampuan Psikologis (mental)

Keterampilan mental adalah keterampilan yang berkaitan dengan perilaku manusia, etika, sikap, mental, juga sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat penilaian positif atau negatif tentang kinerja individu.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya”*

Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah dan variabel yang di teliti dan relevan dengan penelitian sebelumnya sehingga akan mendapatkan persamaan dan perbedaan dari penelitian itu dan di jadikan sebagai novelty atau kebaruan dari penelitian penulis berikut adalah penelitian terdahulunya.

Penelitian pertama yakni penelitian oleh ([Saputri & Akhyari](#), 2014) judulnya Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata Cagar Budaya Bukit Kerang di Kabupaten Bintan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memaksimalkan objek wisata cagar budaya Bukit Kerang

Kabupaten Bintan. Selain itu mengidentifikasi kendala dalam pengembangan objek wisata cagar budaya Bukit Kerang Kabupaten Bintan. Metode penelitiannya memakai analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam menjawab permasalahan tersebut konsep teori yang digunakan yaitu :

1. Peranan hubungan antar pribadi, dengan indikator: peranan sebagai figurehead, peranan sebagai pemimpin, peranan sebagai pejabat perantara,
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi maka dimensinya adalah sebagai monitor, sebagai desiminasi, sebagai juru bicara.
3. Peranan pembuat keputusan yang indikatornya ialah peranan sebagai entrepreneur, peranan sebagai penghalau gangguan, peranan sebagai pembagi sumber, dan peranan sebagai negosiator.

Setelah dilakukan penelitian, proses pengembangan objek wisata Cagar Budaya Bukit Kerang telah dilakukan namun masih berproses, terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi ini yaitu minimnya fasilitas di sekitar objek wisata, termasuk akses masuk objek wisata karena jalanan yang belum di aspal. Tak hanya itu Situs Pra Sejarah Cagar Budaya Bukit Kerang ini kurang familiar karena minim sosialisasi dan publikasi.

Kedua adalah penelitian dari ([Santoso et al., 2015](#)) dengan judul Peranan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara (*The Role And Requirement Of Stakeholders In Tourism Governance In Bunaken National Park, North Sulawesi*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata TNB. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penelitian dokumen dan observasi. Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis pemangku kepentingan dan analisis kebutuhan. Pengamatan menunjukkan bahwa TNB memiliki 17 pemangku kepentingan pengelolaan pariwisata yang juga memainkan peran kunci yang berpengaruh cukup tinggi. Hubungan pemangku kepentingan merupakan kombinasi dari koordinasi, kerjasama dan konflik. Diidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan di dalam tata kelola pariwisata di TNB, yaitu: (1) wawasan dan pemahaman pemangku kepentingan tentang TNB serta mengenai pengelolaan dan regulasi pengembangan pariwisata di kawasan konservasi; (2) menyamakan persepsi di tingkat daerah dengan mempererat koordinasi dan komunikasi tentang tata kelola pariwisata di TNB dan (3) sinergi dari kegiatan dan program pengembangan pariwisata di TNB dari stakeholder.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dilakukan dalam kasus, tempat, waktu, teori, hasil dan kesimpulan serta fokus yang beda, yang terdahulu yakni tata kelola pariwisata oleh Pemerintah Daerah sedangkan peneliti fokusnya sumberdaya manusia inilah kebaruan atau novelty dari penelitian penulis sebagai pembeda dari yang terdahulu.

Sedangkan kesamaanya terletak pada variabelnya yaitu peran, kemudian metode teknik pengambilan data serta analisis data yang sama.

Rumusan Masalahnya dalam penelitian penulis adalah Bagaimana peran pemerintah desa dalam melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran pemerintah desa dalam melakukan

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas informasi atau kedalaman yang dapat dicapai (Afriyani et al., 2015). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan fakta dan pemetaan berdasarkan perspektif atau kerangka mental (Hermanudin, 2019).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber, di mulai dari kepala desa, staf desa, tokoh masyarakat, RT, RW dan masyarakat di desa pedangkamulyan sebanyak 12 orang

Teknik pengumpulan data merupakan cara data tersebut didapatkan dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (Rukajat, 2018). Analisis data yang digunakan menggunakan proses tiga langkah pertama, reduksi data kedua dan penyajian data ketiga adalah validasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berikut peneliti sajikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah di laksanakan sesuai dengan dimensi dan parameter penelitiannya:

A. Peran sebagai Motivator

Harus kita ketahui bahwa “Motivator dalam pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa sebagai motivator diperlukan sebagai dorongan agar pegawai desa maupun masyarakat lebih kompeten dalam mengelola sumber daya alam sekitar” melakukan komunikasi sebagai upaya pemberian motivasi kepada masyarakat sangatlah penting di lakukan oleh kepala desa agar merangsang masyarakat dalam menggerakkan di bidang pendidikan untuk melakukan pembangunan dalam bidang sumberdaya manusia. Sumber daya masyarakat dengan meningkatkan pendidikan di Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.

Hal yang menarik berdasarkan temuan penulis di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, pemerintahan desa melalui kepala desa belum maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai motivator sehingga belum terwujud motivasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Faktanya terdapat 830-kurang lebih orang yang putus sekolah atau tidak melanjutkan bahkan tidak sama sekali menginjak sekolah, kebanyakan dari SD khususnya di kaum perempuan yang memilih untuk menikah bahkan bekerja.

Pelayan terhadap masyarakat di bidang pendidikan sangatlah rendah karena belum terpusatkan kepada program yang khusus sebagai tempat motivasi dari pemerintahan desa dalam bidang pendidikan, dan pemerintah desa belum melakukan kegiatan sosialisasi terhadap , perencanaan desa, pelaksanaan serta evaluasi program desa secara menyeluruh terhadap masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang khusus secara baik untuk di laksanakan oleh masyarakat.

Selanjutnya peranan pemerintah desa sebagai sumber informasi pembanguan desa dan wadah dalam penyampaian informasi pembanguan desa. Kemudian sebagai upaya

partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, namun berdasarkan hasil penelitian semua itu belum terwujud secara fektif dan efisien. Terutama dalam menyalurkan ide dan gagasan melalui musrembang desa dan temu warga serta penyuluhan pendidikan.

Masyarakat Desa Pedangkamulyan tidak begitu kreatif dan kritis dalam pembangunan desa sehingga minim ide dan gagasan, karena terbiasa menerima hasil yang sudah ada., sehingga begitu pentingnya tingkat pengetahuan masyarakat dengan cara meningkatkan taraf pendidikan, sehingga peran pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa saja melainkan masyarakat pun harus ikut serta dalam menjalankan program, sehingga tercipta hubungan sinergis antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Karena masyarakat menyerahkan sepenuhnya dalam pembangunan kepada pemerintahan desa , sehingga tida timbul gagasan baru, hanya program yang apadanya, padahal pihak pemerintahan desa memerlukan masukan sebagai program yang spektakuler.

Peranan lain pemerintahan desa sebagai motivator dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan menciptakan sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti halnya di Desa Pedangkamulyan untuk pendidikan SMA sangatlah kurang bahkan perguruan tinggi.

Demi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang baik dalam segi motivator dalam bidang pendidikan maka kepala desa memegang peran yang sangat vital agar seluruh program dan kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan berikut adalah hasil penelitiannya:

1. Peranan pemerintah Desa Pedangkamulyan sebagai motivator sudah ada ada namun belum cukup baik karena dalam perjalanannya masih belum efektif dilihat dari berbagai faktor, namun dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan masih belum terlaksana, seperti halnya penambahan sekolah beserta fasilitas-fasilitasnya.
2. Strategi dan proses komunikasi yang di jalankan oleh kepala desa Pedangkamulyan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan masih belum terlaksana dengan baik, faktanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan pentingnya pendidikan dan menyadari bahwa akan berguna untuk masa depan.
3. Partisipasi masyarakat Desa Pedangkamulyan dalam hal pembangunan pendidikan yang belum terwujud, karena masih minim ide gagasan dari masyarakat sebagai partisipasi yang ada.

B. Peran Sebagai Fasilitator

Menurut Pitana dan Gayatri ([Pitana & Putu](#), n.d.), bahwa “Fasilitator sebagai fasilitator pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa merupakan hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang di rasakan oleh Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan pada praktiknya, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan berbagai sektor, baik pekerja, masyarakat, maupun swasta.”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai peran pemerintah desa sebagai pihak yang mampu memfasilitasi untuk mewujudkan keadaan yang kondusif dalam hal pembangunan desa (menjembatani kepentingan pihak-pihak dalam memaksimalkan pembangunan desa). Pemerintah koordinator, harus bekerja untuk

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keselamatan, keamanan, dan keamanan, termasuk pengembangan kelembagaan dan infrastruktur. Bantuan kepada UKM, misalnya, pemerintah akan memberikan fasilitas untuk mengurangi jumlah UKM yang dimiliki UKM untuk mencapai tujuan mengembangkan usaha UKM, di Kecamatan Bojongmbir Kabupaten Tasikmalaya.

1. Fasilitator di Bidang Pendampingan

Pendampingan sangat di perlukan oleh masyarakat terutama dalam pendampingan proses wirausaha, ekonomi kreatif dan dalam hal mencegah putus anak sekolah, namun hal ini belum terlaksana secara efektif berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam.

2. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan

Disamping pendampingan harus juga ada dalam bidang pendanaan dan permodalan namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam di lapangan serta mencari tahu lewat peraturan dan dokumentasi yang ada, namun belum juga di temukan kegiatan atau program desa yang berkaitan dengan pemberian pendanaan atau permodalan kepada masyarakat baik dalam pengelolaan UMKM ataupun usaha kreatif lainnya. Termasuk dalam bidang pendanaan pendidikan.

C. Peran Sebagai Dinamisator

Menurut ([Pitana & Putu](#), n.d.), bahwa “Dinamisator dalam pilar *good governance*, pemerintah desa dan masyarakat harus terkait erat agar pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pedangkamulyan mengenai peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah desa pedangkamulyan belum melakukan kegiatan tersebut dan belum menjadi media dinamisator dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia, tetapi bila menjadi dinamisator dalam pembangunan tentunya itu merupakan salahsatu fungsi dari pemerintahan desa agar membuat desa dan masyarakat menjadi dinamis agar tercapai program-program yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran sebagai dinamisator belum berjalan dengan baik dan belum berlaku secara menyeluruh.

D. Peran Sebagai Stabilisator

Kepala desa dapat berperan sebagai pelindung, berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi kehidupan sehari-hari. Peranan selaku Stabilisator Kepala Desa bisa berupa tindakan yang dilakukan ([Siagian](#), 2014)

Menurut Kabag Pembangunan dan jajarannya, berdasarkan temuan studi wawancara yang dilakukan pemerintah tentang proses sosialisasi dalam pembangunan Desa Pendekar Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan memberikan pembinaan fisik dan non fisik, serta sebagai mengatasi kendala pembangunan desa, penjelasan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, program kerja sosial dan terpadu untuk pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang diberikan kepada masyarakat di bidang ekonomi, hukum, agama dan kesehatan, serta pembangunan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat melakukan hal yang sama dengan pemerintah yaitu

bekerja sama dengan jaringan kader desa, , tokoh budaya, dll, untuk menunjukkan kemajuan sosial Desa Pedangkamulyan Tasikmalaya. Selain itu, membentuk kelompok penyuluhan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Sosialisasi juga menyampaikan hal yang sama, antara lain sosialisasi kerja selama pembangunan Desa Pendekar, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat, pemberian fasilitas desa dan petunjuk pemanfaatan sumber daya desa. Namun, beberapa masyarakat tetap skeptis terhadap keputusan pemerintah dan kurangnya koordinasi dengan masyarakat pedesaan.

Stabilisator adalah seseorang yang berusaha menciptakan stabilitas atau keseimbangan untuk mencapai tujuan pembangunan. Indikasi untuk stabilisator meliputi:

1. Menjaga ketertiban antar suku di lingkungan Desa.

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menjaga ketertiban antar suku di lingkungan desa sudah berjalan dengan baik bahkan sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena tidak pernah ada pertikaian yang berkaitan dengan perbedaan ras suku dan agama, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan.

2. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Desa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat desa kurang terjaga dengan baik karena masih terdapat beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah, diantaranya, pos kamling yang belum berjalan baik, masih terdapat pencurian barang- di masyarakat sehingga masih perlu perjuangan yang panjang..

3. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa.

Menciptakan kestabilan perekonomian desa kurang baik, karena belum adanya dukungan dan dorongan pemerintah desa terhadap UMKM dan ekonomi kreatif di masyarakat, baik dalam permodalan maupun peran pemerintah desa melalui BUMADES dengan menjadi fasilitator atau pengepul hasil produksi masyarakat sebagai peran dalam pemasaran.

4. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa.

Dalam menjaga dan memelihara lingkungan hal ini sudah dilakukan dengan baik karena sudah tercipta dan terwujud pola pikir masyarakat dalam kegiatan ini melalui kegiatan gotong royong, seperti halnya membersihkan jalan, membersihkan halaman mesjid serta tempat-tempat umum yang disediakan pemerintahan desa.

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa.

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Desa Pedangkamulyan, karena hal yang sangat sulit bila mensejahterkan dalam bidang ekonomi pemerintahan desa harus berfikir keras untuk hal ini, berdasarkan hasil penelitian belum ada jawaban yang menyatakan sudah baik dalam kesejahteraan, karena program bantuan yang masuk kemasyarakat merupakan program daerah dan nasional bukan merupakan program desa.

E. Peran Sebagai Inovator

Menurut ([Siagian](#), 2014), bahwa “Inovator adalah orang yang dapat menemukan hal-hal baru, ide-ide baru, dan sistem baru selama proses pengembangan”.

Berdasarkan temuan penelitian tentang inovasi pemerintah seperti di Desa Pedangkamulyan Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

1. Mengadakan Kampung Cerdas, meningkatkan potensi desa, yaitu dengan mengadakan latihan dan operator latihan kerja, serta rencana memperluas lahan penanaman padi, ubi, singkong, palawija dan lainnya hal ini berdasarkan hasil penelitian belum berjalan dan belum di lakukan secara efektif
2. Membentuk koperasi desa sederhana untuk membantu perekonomian masyarakat, pemerataan lembaga keagamaan, penyediaan tim kesehatan desa dan bidan desa; berdasarkan hasil penelitian hal ini belum berjalan secara efektif karena belum melakukan dengan sesuai konsep yang ada.

F. Peran Sebagai Pelopor

Menurut Sondang P. Siagian ([Siagian](#), 2014), bahwa “Pelopor adalah pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inovasi pemerintahan, dan pandangan yang jelas artinya pemerintah harus memainkan peran utama dalam kehidupan nasional secara keseluruhan.”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai peran pemerintah dalam pembangunan adalah untuk menentukan arah investasi dan pembangunan di daerah yang dapat meningkatkan perekonomian pedesaan..

Pemerintah juga ikut terlibat langsung ke lokasi tanpa perantara, dan pemerintah desa menjadi inovator langsung, membrikan bimbingan sebagai inovasi yang bisa di lakukan. Dengan memberikan pelatihan kerja secara sederhana, dan selalu menghimbau kepada tokoh masyarakat dan kepala desa selalu menggunakan pengeras suara dalam perencanaan pembangunan menyerukan kegiatan gotong royong menjadi inovator dalam bentuk seni masyarakat karena pembangunan infrastruktur di desa masih 55% dan masih sama. Hal ini akibat dari sumber anggaran yang terbatas dan harus di bagi-bagi

Sementara desa telah merespon dengan baik terhadap rencana pembangunan, tetapi masih ada beberapa proyek yang belum selesai. Kemudian peningkatan kedisiplinan di kepala desa agar di tubuh desa menjadi disiplin masih mejadi pekerjaan rumah yang harus di tingkatkan. Kepala sudah memiliki keterampilan yang diikuti, tetapi aktivitasnya belum optimal. Kepeloporan ini sudah cukup baik hanya perlu peningkatan saja, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memelihara pembangunan, namun pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan dan kondisi rusak karena pembangunan yang ada tidak terpelihara dengan baik.

G. Peran Sebagai Modernisator

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai kemampuan pengelolaan kekayaan alam dan keuangan, dengan melakukan peningkatan pada sektor ekonomi dalam upaya meningkatkan kreatifitas pada sumberdaya lokal untuk menciptakan Desa produktif dan inovatif upaya menciptakan *sustainable* sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan IPM Desa Pedangkamulyan. Dan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam maka hal ini belum bisa terwujud berdasarkan informasi dari beberapa informan yang peneliti temui, maka bisa di katakan belum efektif dan efisien

Disamping itu dalam upaya mendaur ulang sumber daya yang tak dapat di pergunakan lagi dan menurun di pasaran belum terwujud secara komprehensif, dan belum mampu mengembangkan lagi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga belum dapat di pergunakan lagi, banyak masyarakat yang mengatakan sesuai hasil

penelitian bahwa, pemerintah desa belum mampu membuat sebuah regulasi atau peraturan yang tegas dalam mengelola kekayaan alam dan melindunginya. Serta belum mampu mengajak dan membimbing masyarakat untuk membudidayakan hasil potensi yang di miliki desa karena pemerintahan desa belum memiliki panduan kerja dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini peran pemerintah desa dalam membangun sumber daya manusia yaitu peran sebagai motivator dalam peranan pemerintah Desa Pedangkamulyan telah melakukan dengan baik untuk memobilisasi masyarakat untuk swadaya dalam rangka pembangunan olahraga, yang terpelihara dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, terlihat dari berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dan hasil pengembangan olahraga., namun dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan masih belum terlaksana, seperti halnya penambahan sekolah beserta fasilitas-fasilitasnya.

Peran sebagai Stabilisator dalam perencanaan pembangunan, dimulai dari kelembagaan tingkat desa, kerjasama antara kader desa dengan tokoh adat dan jaringan lainnya, serta perencanaan pembangunan masyarakat.

Pemerintah juga turun langsung ke lokasi, tanpa perantara atau media yang terhubung, dan pemerintah langsung menjadi motor penggerak rencana kerja tersebut, namun pemerintah gagal memberikan pembinaan dan arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Pemerintah juga secara langsung mengkoordinasikan faktor-faktor yang memperlancar laju pembangunan dan memberikan bantuan kepada masyarakat.

Bibliografi

- Andika, C. (2021). *Peran Kepala Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Juhanperak*, 2(2), 99–109.
- Gultom, A. W. G. (2020). *Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Ulak Pandan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v1i1.65>
- Hermanudin, H. (2019). *Implementasi Model Pembelajaran Core dan Kendalanya Pada Materi Teks Cerita Fabel. Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 7(1), 25–37. <http://dx.doi.org/10.30659/j.7.1.25-37>
- Lestanata, Y., & Pribadi, U. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014–2015. Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 368–389.
- Okta Hendrik, O. (2017). *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(2), 459–469.
- Pitana, I. G., & Putu, G. (n.d.). *Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish.*
- Santosan, L. W., & Adji, T. N. (2018). *Karakteristik Akuifer dan Potensi Airtanah Graben Bantul. UGM Press.*
- Saputri, F., & Akhyari, E. (2014). *Peran dinas pariwisata dalam mengoptimalkan obyek wisata cagar budaya Bukit Kerang di Kabupaten Bintan. Naskah Publikasi.*
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Bumi Aksara.*
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79–96. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.895>
- Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Governance*, 1(1).
- Suparman, A. (2016). *Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Efektivitas Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Perpustakaan.*
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.*

Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia
di Desa Pedangkamulyan

Wulandary, R. M. C., & Rohman, A. (2018). *Peranan Pemerintah Kota Batu Dan Pemerintah Desa Punten Dalam Pemberdayaan Wisata Petik Apel*. *Reformasi*, 8(2), 178–185. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1150>